



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Conversion and Colonialism: Islam and Christianity in North Sulawesi, c. 1700-1900

Lopez, A.C.

Citation

Lopez, A. C. (2018, September 18). *Conversion and Colonialism: Islam and Christianity in North Sulawesi, c. 1700-1900*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/65631>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/65631>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/65631> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Lopez, A.C.

Title: Conversion and Colonialism: Islam and Christianity in North Sulawesi, c. 1700-1900

Issue Date: 2018-09-18

Ringkasan

Perpindahan dan kolonialisme: Islam dan Kristen di Sulawesi Utara, c. 1700-1900

Disertasi ini bergumul dengan masalah perpindahan agama menjadi Muslim dan Kristen yang berlangsung pada periode yang sama di tiga sub-daerah di Sulawesi Utara. Secara khusus disertasi ini ingin menjelaskan penyebab perpindahan kepercayaan elit dan massa menjadi Muslim di Bolaang-Mongondow dan Kristen Protestan di Minahasa dan Sangir-Talaud pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas. Perhatian utama ditujukan pada perubahan-perubahan abad kesembilan belas pada ekonomi-politik kolonial dan akibat-akibat sosial dan agama yang luas di wilayah tersebut. Ia menunjukkan bahwa walaupun terdapat keberagaman kondisi lokal, perpindahan agama ke Islam dan Kristen di daerah tersebut memiliki akar sebab yang sama. Oleh karenanya disertasi ini berbeda dengan literatur akademis lain mengenai Indonesia yang seringkali melihat perpindahan agama menuju Kristen dan Islam sebagai fenomena yang terpisah dengan akar yang khas dan berbeda.

Argumen disertasi ini adalah bahwa dorongan langsung terjadinya perpindahan massal diakibatkan oleh karena usaha sentralisasi negara kolonial Hindia Belanda pada abad kesembilan belas. Reformasi yang dilakukan oleh negara merenggangkan hubungan patron-klien tradisional dan sehingga membuka kesempatan non-elit untuk mendapatkan kekayaan materi dan hubungan sosial yang dihormati – yaitu, menjadi anggota salah satu agama dunia – yang selama ini dimonopoli oleh elit penguasa. Dalam beberapa kasus tertentu, ketua suku teratas (*apical chief*) yang posisinya diperkuat oleh negara kolonial memiliki kepentingan pribadi untuk mendorong perpindahan agama dikalangan orang-orang non-elit. Strategi yang dipilih ketua suku ini bertujuan untuk memusatkan kekuasaan diwilayah mereka. Seiring dengan penurunan status dikalangan ketua-ketua bawahan (*subaltern chiefs*) dan penduduk dibawah mereka, maka ketua suku teratas ini meningkatkan legitimasi budaya mereka dan sekaligus mengklaim otoritas politik atas mereka yang telah berpindah agama.

Dengan memusatkan perhatian pada aspek politik dan ekonomis dari perpindahan agama (khususnya peran dan motivasi dari elit ketua), disertasi ini menunjukkan keterbatasan dari beberapa teori konvensional dalam literatur akademis tentang Indonesia. Sebagai contoh, apa yang sering disebut sebagai teori ‘bottom-up’ mengarah pada keinginan orang untuk berpindah

ke identitas keagamaan yang kosmopolitan; tetapi sering gagal memikirkan bagaimana kekuatan sosial yang ada membuka atau menutup akses terhadap identitas yang dimaksud. Sementara itu, ‘teori perdagangan’ percaya bahwa konversi massal didorong oleh koneksi luar-negeri, kuatnya kerangka hukum dan kuatnya rasa saling percaya (*trust*) antar-pribadi – yang semuanya kelebihan yang tersedia kepada mereka yang menjadi anggota agama dunia. Tetapi interaksi yang sering dan terus-menerus antara pedagang luar negeri dan mayoritas penduduk itu kemungkinan tidak ada karena ketua suku memonopoli perdagangan dengan dunia luar dan melarang kawula untuk berdagang. Selain itu, bukti sejarah menunjukkan bahwa negara kolonial Hindia Belanda berfungsi sebagai penyedia utama kestabilan politik dan sebagai mediator utama dimasa ketika penduduk Sulawesi utara sedang berpindah agama ke Islam atau Kristen. Terakhir, ‘teori krisis sosial komprehensif’ merujuk pada ambuknya masyarakat tradisional yang menyebabkan terjadinya kegalauan spiritual yang luas dan sehingga mendorong penduduk untuk menerima identitas agama asing. Tetapi berakhirnya tatanan tradisional di Sulawesi utara tidak sekacau dan seluas yang dituntut oleh ‘teori krisis sosial komprehensif. Terdapat beragam bentuk sosial dan politik masyarakat pribumi yang dilanjutkan setelah konversi. Selain itu, dan mungkin lebih penting, dorongan masyarakat untuk pindah agama tampaknya didorong bukan oleh ‘kegalauan spiritual’ melainkan keinginan kekal untuk meniru kaum elit. Secara umum, teori-teori diatas tidak memberi porsi perhatian yang cukup terhadap dinamika politik masyarakat lokal.

Mengingat keterbatasan teori-teori yang ada, disertasi ini mengajukan faktor-faktor ‘permintaan’ dan ‘penawaran’ sebagai variabel analitis yang penting dalam memahami perpindahan agama ke Islam dan Kristen. Permintaan disini merujuk pada keinginan warga Sulawesi utara non-elit untuk mengadopsi identitas keagamaan yang kosmopolitan guna mencapai status yang sama dengan elit penguasa. Disertasi ini menunjukkan bahwa keinginan ini sering ditantang oleh kaum elit yang menolak perpindahan agama massal yang mirip dengan penolakan mereka terhadap kepemilikan massal barang-barang prestisius. Oposisi elit terhadap konversi merupakan sebuah strategi politik guna mempertahankan perbedaan status sosial dalam konteks kompetisi status yang kuat antara ketua utama dan ketua bawahan agar tetap menjadi ketua utama dalam beragam masyarakat di Sulawesi utara. Penawaran disini merujuk pada kebijakan sentralisasi negara kolonial Hindia Belanda di abad kesembilan belas yang menyederhanakan aliran otoritas politik lokal, mengkomersilkan ekonomi regional dan

memperkenalkan perpajakan berbasis uang. Kebijakan-kebijakan ini diperkenalkan pertama di Minahasa pada tahun 1850an dan baru kemudian diterapkan di wilayah lain karena fokus utama kepentingan kolonial Belanda utamanya tertuju hanya di Minahasa.

Dinamika antara faktor-faktor permintaan dan penawaran terejawantahkan secara berbeda di berbagai sub-wilayah di Sulawesi utara. Di Minahasa, periode perpindahan agama secara massal ke agama Kristen terjadi dibawah kekuasaan liberal Residen A. J. van Olpen (1843-1849) dan menguat dibawah kekuasaan Residen A. J. F. Jansen (1853-1859). Van Olpen dan Jansen mendorong penggunaan uang sebagai alat pertukaran dan perpajakan serta mencoba menghapus pertukaran wajib tekstil dengan beras. Kebijakan liberal periode tersebut juga menyederhanakan aliran otoritas lokal dan sehingga mengubah ketua-ketua Minahasa menjadi pegawai. Para ketua – khususnya ketua bawahan – dipaksa untuk meninggalkan peran mereka sebagai pedagang komersil dan dibatasi peran mereka sebagai pengumpul pajak untuk negara kolonial. Secara umum, reformasi ekonomi dan politik yang dijalankan merenggangkan ikatan ketua-ketua bawahan atas kawula mereka dan sehingga mendorong mereka menuju agama Kristen – agama prestisius dari kelas ketua Minahasa semenjak zaman Kompeni. Kasus O. J. Pelenkahu, ketua Kristen di Tonsea, menggambarkan dinamika diatas. Pelenkahu berhasil melemahkan otoritas dari ketua-ketua bawahan, yang berkompetisi dengannya untuk kekuasaan, lewat penggunaan otoritas negara kolonial. Ia menghapus monopoli perdagangan beras dari kaum ketua bawahan dan melarang mereka untuk melaksanakan upacara fosso dengan alasan bahwa ritual agama pribumi ini berseberangan dengan usaha-usaha mendorong penyebaran agama Kristen. Keberhasilan Pelenkahu dalam hal ini mengakibatkan pencapaian supremasi politik di distriknya dibawah usaha Kristenisasi yang didukung oleh Belanda. Oleh karenanya, ia membenarkan kekuatan simbolis dan status yang dikaitkan dengan agama Kristen selagi menelanjangi hilangnya otoritas dikalangan ketua bawahan yang berbasis kepercayaan lokal.

Di Bolaang-Mongondow perpindahan masal ke agama Islam pertama yang terekam terjadi juga pada masa sentralisasi negara kolonial pada tahun 1850an. Dalam usaha menerapkan reformasi fiskal dan politik, negara kolonial memperkuat otoritas dari penguasa utama (*apical*) (A. C. Manoppo, raja Bolaang-Mongondow). Manoppo, seperti rekan Minahasanya O. J. Pelenkahu, memanfaatkan kesempatan ini untuk melemahkan otoritas dari ketua lainnya dan memusatkan kekuasaannya dengan cara tertentu. Ketua bawahan dari Bolaang-Mongondow wilayah pegunungan menghambat penduduknya untuk berdagang disepanjang pesisir dan

membangun hubungan dengan pedagang muslim, tapi Raja A. C. Manoppo malah mendorong hal tersebut. Dengan kebijakannya, Raja A. C. Manoppo melebarkan basis pajak dari wilayah kekuasaannya dan memenuhi kewajiban fiskal kepada patronnya – negara kolonial Hindia Belanda. Promosi Manoppo terhadap agama Islam merupakan strategi kebudayaannya guna meruntuhkan otoritas dari ketua-ketua bawahan khususnya karena agama telah selama ini menjadi penanda perbedaan status antara ketua bawahan dengan penduduk yang berada dibawah mereka. Sama seperti di Minahasa, di Mongondow terdapat banyak resistensi diantara elit ketua yang telah dilemahkan tersebut. Sebagai contoh, keluarga Mokoginta dari distrik Passi menolak otoritas dari keluarga Manoppo dengan cara mengepalai faksi dari ketua-ketua yang menolak membayar pajak yang diminta oleh raja. Anggota dari keluarga Mokoginta menolak Islamisasi dari penduduk mereka bersamaan dengan penolakan mereka terhadap sentralisasi kekuasaan dibawah raja-raja Manoppo. Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan masal ke agama Islam di Mongondow berhubungan erat dengan konsolidasi kekuasaan politik dari ketua utama dari wilayah tersebut.

Di Sangir-Talaud, reformasi kolonial yang terjadi di Minahasa dan Bolaang-Mongondow pada tahun 1850an baru terjadi pada tahun 1890an. Akibatnya, ketua berhasil mempertahankan otoritas tradisional dan tetap kuat untuk menolak strategi penginjil Kristen. Sebagai contoh, Jacob Ponto, ketua utama dari pulau Siau, sukses untuk menolak kedatangan ‘penginjil-tukang’ (*zendeling-werklieden*) Eropa yang telah ditunjuk oleh pemerintah kolonial. Ponto mengadakan ekspedisi-ekspedisi *ngayau* (perburuan kepala) dan merayakan upacara-upacara ‘pagan’ guna memperkuat otoritasnya. Tetapi reformasi luas yang dijalankan oleh Residen M. C. E. Stakman dan E. J. Jellesma pada akhir tahun 1880an dan 1890an pada akhirnya mengakibatkan kejatuhan kekuasaan dari Ponto. Residen-residen reformis ini menginginkan terjadinya komersialisasi ekonomi lokal dengan mengetrapkan perpajakan uang berdasarkan sensus serta memaksa penggunaan uang dalam pertukaran. Mereka juga menyederhanakan kantor ketua lokal dan menunjukkan kehebatan militer negara kolonial Hindia Belanda lewat serangkaian strategi kampanye pasifikasi militer. Sama seperti di Bolaang-Mongondow dan Minahasa, reformasi demikian memiliki efek yang luas terhadap masyarakat Sangir-Talaud. Sebagai contoh, di Siau, penduduk pulau Makelehi terbebaskan dari hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang opresif dengan elit Siau, dan khususnya dengan Jacob Ponto. Dalam hanya beberapa tahun, banyak dari penduduk pulau menjadi anggota aktif gereja kristen lokal yang pada saat itu telah

berubah menjadi pusat kehidupan masyarakat tanpa melibatkan otoritas raja yang seringkali penuh hubungan penindasan.

Disertasi ini mengungkapkan sebab yang sama untuk menjelaskan perpindahan agama elit dan massa ke Islam dan Kristen dimasa kolonial Indonesia. Disertasi ini mempertimbangkan motivasi penduduk dalam berpindah agama dengan tetap mempertimbangkan pergeseran-pergeseran politik dan ekonomi yang luas. Disertasi ini oleh karenanya menekankan beragam dinamika sosial dan kompetisi diantara elit pribumi yang selama ini kurang diperhitungkan dalam buku-buku tentang perpindahan agama.